

**PRASANGKA SOSIAL DALAM KOMUNIKASI ANTARETNIS
(studi Antara Suku Bali dengan Suku Lampung di Kecamatan Sidomulyo
Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung)**

Khomsahrial Romli¹ dan Ayu Maulia²

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya konflik antarsukudi Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Beberapa diantaranya adalah pembakaran pasar Probolinggo Lampung Timur oleh Suku Bali; pada 29 Desember 2010, Perang Suku Jawa/Bali dengan Suku Lampung berawal dari pencurian ayam; pada September 2011 suku Jawa dengan Suku Lampung; Januari 2012, Sidomulyo Lampung Selatan Bali dengan Suku Lampung; pada Oktober 2012, Sidomulyo Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana interaksi antara penduduk suku asli Lampung dengan suku pendatang serta penyebab konflik antarsuku di Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dilaksanakan pada Bulan Januari hingga Maret 2014 di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan. Subjek penelitian adalah seluruh warga penduduk di Kelurahan Sidowaluyo berjumlah 2597 KK, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar suku yang terjadi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi di antara penduduk asli dan pendatang, kenakalan remaja dan prasangka sosial yang negatif dari suatu kelompok terhadap kelompok yang lain.

Kata kunci: Budaya, Konflik, Prasangka Sosial.

¹ Staf pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Univeritas Bandar Lampung

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung

PREJUDICE IN SOCIAL COMMUNICATION INTER ETHNIC (A study Between Balinese with Lampungnese in Sidomulyo District, South Lampung, Lampung Province)

Khomsahrial Romli¹ dan Ayu Maulia²

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of inter-ethnic conflict in Indonesia, particularly in Lampung province. Some of them are the burning of Probolinggo market in East Lampung by Balinese; in December 29, 2010, a Civil War between Javanese/Balinese with Lampungnese which was originated from stealing chickens; in September 2011 there was a dispute between Javanese with Lampungnese; in January 2012, in Sidomulyo, South Lampung, there was a fight between Balinese with Lampungnese; and in October 2012, in Sidomulyo South Lampung. The purpose of this study is to investigate in depth about the interaction between the indigenous population (Lampungnese) with tribal settlers and the cause of conflicts between tribes in the district of Sidomulyo South Lampung. This study used a qualitative approach with descriptive method. It was implemented in January to March 2014 in the village of Sidowaluyo of district Sidomulyo, South Lampung. The subject of the research was all members of the population in Sidowaluyo Village which was amounted of 2597 family; the data collection techniques used observation, interviews, and documentation studies. The results showed that the inter-tribal conflict that occurred in the Village of Sidowaluyo, Sidomulyo District, South Lampung was caused by several factors such as the economic gap between natives and immigrants, juvenile delinquency and negative social prejudices of a group against another group. Intercultural communication activities carried out had not been running maximally and still tended to lead to an attitude of ethnocentrism.

Keywords: Culture, Conflict, Social prejudice.

¹Lecturer of Communication Studies Study Program of Bandar Lampung University

²Student of Communication Studies Study Program of Bandar Lampung University

PENDAHULUAN

Konflik yang merebak di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir sangat diwarnai oleh persoalan struktural. Kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi yang dirasakan terutama penduduk pribumi. Rangkaian konflik yang terjadi di Indonesia seakan tidak pernah terputus, yang memilukan adalah hampir semua konflik mengandung kekerasan dengan berbagai bentuk dan intensitasnya. Bahkan Colombijn & Linbald (2002) pernah menyatakan bahwa “*Indonesia is a violent state*” (Indonesia adalah sebuah negara gagal). Kekerasan bahkan telah menjadi sebuah komoditi sehari-hari untuk memaksakan kehendak dan masing-masing komponen masyarakat terbiasa untuk tega memaksakan kehendak melalui pendayagunaan tindak kekerasan. Sejarah telah mencatat konflik etnis di beberapa daerah di Indonesia, kejadian di Ambon, Sampit, Sangauledo, Poso, merupakan percikan perang saudara yang memprihatinkan, sejak mereka hidup dalam persaingan untuk menguasai sumber daya alam, sumber daya politik dan ekonomi. Konflik antar etnis biasanya dikenal dengan perang suku, melibatkan berbagai bentuk kekerasan dan peperangan yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hubungan antarkelompok sering ditampilkan sikap-sikap yang khas. Dalam kaitan ini, salah satu konsep yang banyak diulas oleh para ilmuwan sosial adalah prasangka (*prejudice*). Kelompok etnis dan minoritas di manapun saja selalu menemui kesulitan dan hambatan. Latar belakang hambatan tersebut biasanya

disebabkan setidaknya oleh tiga hal: (1) Prasangka historis; (2) diskriminasi; dan (3) perasaan superioritas *in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (outgroup). Dalam beberapa waktu terakhir, sering terdengar konflik atau perang antar suku.

Di beberapa daerah di Provinsi Lampung terjadi konflik antarsuku, diantaranya berada di Kabupaten Way Kanan antara Suku Lampung dan Suku Bali. Dengan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas dan keinginan yang kuat untuk mengetahui secara benar apakah ada prasangka sosial, maka penulis melakukan penelitian tentang komunikasi antarbudaya. Dalam hal ini, penulis mengajukan judul mengenai komunikasi antar budaya, yaitu “Prasangka Sosial Dalam Komunikasi Antaretnis (Studi Antara Suku Bali dengan Suku Lampung di Kecamatan Sido Mulyo Lampung Selatan)”. Dalam catatan sejarah dan catatan media dikatakan bahwa awal dari konflik yang terjadi tersebut yang kemudian memendam sebuah dendam atau luka lama yang selanjutnya meletus kembali baru-baru ini adalah diawali dari sebuah peristiwa pada awal tahun 1990an. Peristiwa yang mempersoalkan lahan perkebunan tersebut merupakan sebuah pemicu lama yang menunjukkan ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, yang sampai sekarang menjadi sebuah catatan hitam atas keberadaan Balinuragadi daerah Lampung Selatan ini. (<http://ighoelmachete.wordpress.com/2012/12/16/peristiwa->

konflikbalinuragalampung-selatan-dan-persatuan-indonesia/).

Peneliti memfokuskan diri pada cara meminimalisir terjadinya konflik dalam komunikasi antara Suku Bali dengan Suku Lampung sebagai bagian dari kegiatan komunikasi antarbudaya. Konflik dalam hal ini dipandang sebagai bagian dari proses interaksi sosial dalam melakukan kegiatan komunikasi. Masalah penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimanakah komunikasi antara Suku Lampung dengan Suku Bali? 2) Apakah terjadi prasangka sosial dalam proses komunikasi Suku Lampung dengan Suku Bali? 3) Apa saja penyebab konflik antarsuku di Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan?

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam tentang prasangka sosial dalam komunikasi antarbudaya antara Suku Lampung dengan Suku Bali di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan tujuannya yakni: 1) Untuk menganalisis lebih mendalam mengenai kegiatan komunikasi antara Suku Lampung dengan Suku Bali khususnya di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan; 2) Untuk menganalisis lebih mendalam tentang prasangka sosial yang muncul dalam proses komunikasi antara Suku Lampung dan Suku Bali di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan; dan 3) Untuk menganalisis lebih mendalam tentang konflik antara Suku Lampung dengan Suku Bali dalam tinjauan Ilmu

Komunikasi, khususnya komunikasi antarbudaya.

Secara teoretis penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan berkenaan dengan pengembangan konsep, teori, metode, dan pendekatan dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi antarbudaya. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berlangsungnya komunikasi yang harmonis antar berbagai suku, khususnya Suku Lampung dengan Suku Bali. Menghilangkan prasangka-prasangka negatif untuk mewujudkan keharmonisan diantara suku pendatang maupun suku asli di suatu daerah, khususnya Suku Lampung dan Suku Bali yang ada di Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.

Pandangan Para Ahli Tentang Prasangka Sosial; Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk memahami penyebab terjadinya konflik antaretnis dalam suatu daerah. Apakah konflik tersebut karena prasangka sosial dari suatu kelompok/golongan tertentu kepada kelompok yang lain? Hal ini senada dengan pendapat ahli Sherif and Sherif, yakni “Prasangka sosial adalah suatu sikap negatif para anggota suatu kelompok, berasal dari norma mereka yang pasti, kepada kelompok lain beserta anggotanya”. Sedangkan menurut Kimball Young, prasangka adalah mempunyai cirri khas pertentangan antara yang ditandai oleh kuatnya *in group* dan *out group*.(Abu Ahmadi, 2009:196). Sementara Drs. H. Abu Ahmadi (2009:194) dalam bukunya yang berjudul psikologi sosial

mengemukakan batasan mengenai prasangka sosial sebagai berikut: Prasangka sosial adalah suatu sikap negatif yang diperlihatkan oleh individu atau kelompok terhadap individu lain atau kelompok lain. Berprasangka buruk terhadap seseorang atau satu kelompok tanpa mencari informasi yang akurat bisa menimbulkan prasangka sosial. Lebih lanjut Sherif menjelaskan bahwa prasangka dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu sikap yang tidak simpatik terhadap kelompok luar (*out group*). Hal ini ditunjukkan dalam jarak sosial (*Social Distance*) yang merupakan suatu posisi yang diberikan oleh para anggota kelompok yang berprasangka itu kepada kelompok lain dalam persoalan simpati. Apabila individu anggota kelompok itu menaruh simpati terhadap suatu kelompok (misalnya kelompok A) maka kelompok A ini akan ditempatkan dalam posisi yang dekat dengannya, sedangkan kelompok B di mana tidak dikenal simpati tetapi bahkan antipasti maka kelompok B ini ditempatkan pada posisi yang jauh darinya. Semakin bertentangan atau bermusuhan bahkan saling membenci di antara dua kelompok itu maka makin jauh jarak sosial (*social distance*). Apabila situasi semacam ini berlangsung cukup lama, jarak sosial ini akan menjadi norma di dalam kelompok. Jarak sosial yang sudah menjadi norma di dalam kelompok akan dapat menimbulkan suatu kejadian bahwa orang berprasangka tanpa bergaul dulu dengan individu atau kelompok yang dikenai prasangka itu. Suatu hal yang menunjukkan norma sosial adalah

kesamaan respons dari para anggota kelompok. (Ahmadi, 2009:196-197).

Ahmadi (2009:194) Prasangka timbul dari adanya norma sosial, sebagai contohnya pada kebanyakan anak-anak di Amerika Serikat prasangka terhadap orang Negro. Karena menurut pendapatnya, orang Negro itu kotor, bodoh dan sebagainya. Larangan yang bersifat terus menerus ini akhirnya berubah menjadi norma pada anak, dan norma inilah yang digunakan untuk memilih orang lain. Dengan demikian pada anak sudah terbentuk atau sudah tumbuh prasangka terhadap orang Negro, meskipun kadang-kadang belum bergaul atau berjumpa sekalipun. Pada umumnya prasangka itu bersifat negatif. Yang menjadi korban adalah individu atau kelompok yang dikenai prasangka.

Prasangka sosial terhadap sebuah kelompok bisa turun temurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Ketidaksukaan seseorang/kelompok terhadap kelompok lain akan menjadi masalah besar jika dibiarkan berlarut-larut. Orang tidak begitu saja secara otomatis berprasangka terhadap orang lain. Tetapi ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan ia berprasangka. Prasangka di sini berkisar pada masalah yang bersifat negatif terhadap orang (kelompok) lain. Menurut Ahmadi (2009: 194-196) ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya prasangka yakni:

- 1) Orang berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam. Dalam berusaha, seseorang mengalami kegagalan atau kelemahan. Sebab dari kegagalan itu tidak dicari pada

dirinya sendiri tetapi pada orang lain. Orang lain inilah yang dijadikan kambing hitam sebagai sebab kegagalannya.

- 2) Orang berprasangka, karena memang ia sudah dipersiapkan di dalam lingkungannya atau kelompoknya untuk berprasangka.
- 3) Prasangka timbul karena adanya perbedaan. Perbedaan ini menimbulkan perasaan superior. Perbedaan bisa meliputi: a) Perbedaan fisik/biologis, ras; b) Perbedaan lingkungan/geografis; c) Perbedaan kekayaan; d) Perbedaan status sosial; e) Perbedaan kepercayaan/agama; dan e) Perbedaan norma sosial.
- 4) Prasangka timbul karena kesan yang menyakitkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan.
- 5) Prasangka timbul karena adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat umum atau kebiasaan di dalam lingkungan tertentu.

Dalam menerima sebuah informasi, kita harus meneliti kebenarannya terlebih dahulu apakah itu sebuah fakta atau hanya sebuah isu. Seperti yang disebutkan salah satu ayat dalam kitab suci umat Islam (Al-Qur'an) yang berbunyi:

“ Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S Al-Hujurat: 6).

Ahmadi (2009:100) menyebutkan norma-norma kelompok dan norma-norma sosial tidak akan timbul

dengan sendirinya, melainkan terjadi interaksi sosial antara individu di dalam kelompok sosial. Norma sosial senantiasa terjadi bersamaan dengan adanya interaksi manusia di dalam kelompok, dengan kata lain: Norma sosial adalah hasil daripada interaksi sosial antara anggota suatu kelompok. Norma sosial merupakan pengertian yang meliputi bermacam-macam hasil interaksi kelompok, baik hasil interaksi daripada kelompok-kelompok yang telah lampau, maupun hasil interaksi yang sedang berlangsung. Termasuk padanya semua nilai-nilai dan harga-harga sosial, adat istiadat, konvensi dan sebagainya. Norma sosial adalah patokan-patokan umum mengenai tingkah laku dan sikap individu anggota kelompok yang dikehendaki oleh kelompok mengenai bermacam-macam hal yang berhubungan dengan kehidupan kelompok yang melahirkan norma-norma itu.

Pendekatan Teori Komunikasi Sosial dalam Meningkatkan Integrasi Bangsa;

Komunikasi Sosial adalah suatu kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu integrasi sosial. Karena itu kegiatan komunikasi sosial adalah lebih intensif daripada komunikasi massa. Melalui komunikasi sosial terjadilah aktualisasi dari masalah-masalah dan masalah tersebut dapat dipecahkan melalui konsensus. (Susanto, 1979: 1-2). Melalui komunikasi sosial, suatu integrasi bangsa dapat diharapkan dalam proses pembangunan yang makin melaju dan berhasil. Integrasi berarti juga proses pembauran hingga menjadi

kesatuan yang utuh atau bulat, dan seimbang serta jujur dan dapat dipercaya. Maurice Duverger (dalam Ahmadi, 2009,297) memberikan definisi:

“Integrasi adalah dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian dari organisme yang hidup atau antara anggota-anggota di dalam masyarakat”.

Sedangkan Paul B. Horton menyatakan bahwa integrasi merupakan suatu proses pengembangan masyarakat di mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan serta secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Ahmadi (2009: 297) mengungkapkan integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sosial sehingga saling menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Abu Ahmadi melihat bahwa dalam integrasi masyarakat terdapat kerja sama dari seluruh anggota masyarakat mulai dari tingkatan individu, keluarga lembaga dan masyarakat sehingga menghasilkan persenyawaan berupa konsensus nilai yang sama-sama dijunjung tinggi. Namun demikian, integrasi sosial tidak cukup diukur dari kriteria berkumpul atau bersatunya anggota masyarakat dalam arti fisik. Hal tersebut senada dengan pendapat Abdul Syani (dalam Ahmadi, 2009: 298), integrasi sosial tidak cukup diukur dari kriteria berkumpul atau bersatunya anggota masyarakat dalam arti fisik. Ia juga sekaligus merupakan pengembangan sikap solidaritas dan perasaan manusiawi. Pengembangan sikap dan

perasaan manusia ini merupakan dasar dari keselarasan suatu kelompok atau masyarakat.

Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai-nilai, norma-norma dan pranata-pranata sosialnya. Menurut William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff, syarat terjadinya suatu integrasi sosial adalah sebagai berikut:

- a. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal ini berarti kebutuhan fisik dan sosialnya dapat dipenuhi oleh sistem sosial mereka.
- b. Masyarakat berhasil membentuk kesepakatan (*consensus*) bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya.
- c. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. (Ahmadi,2009:298)

Pandangan Teori Komunikasi Antarbudaya terhadap Interaksi Sosial Masyarakat; Identitas seseorang dibentuk dalam interaksi komunikatif dengan yang lain. Menurut Heckt dan rekannya, identitas juga dipertahankan dan dimodifikasi melalui interaksi

sosial. Identitas juga mulai mempengaruhi interaksi melalui perilaku yang memotivasi (Hecht, Jackson, dan Ribeau, 2003, 61). Budaya seseorang dapat membentuk pemahaman dan ekspektasi mengenai komunikasi yang benar dan sesuai dengan berbagai latar belakang sosial-misalnya, ruangan kelas, rumah sakit atau rapat penjualan. Namun, pemahaman dan ekspektasi ini berhubungan dengan budaya, dan apa yang pantas dalam budaya seseorang bisa jadi tidak pantas dalam budaya orang lain. Dalam pertemuan antarbudaya, harapan berbeda mengenai identitas serta gaya komunikasi yang ditampilkan berpotensi menimbulkan kegelisahan, kesalahpahaman, dan bahkan konflik. Oleh karena itulah, Imahori dan Cupach (2005, 197) menganggap “identitas budaya sebagai elemen utama dalam komunikasi antarbudaya.

Bahasa dalam Interaksi Komunikasi Antarbudaya; Bahasa merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Hubungan antara simbol yang dipilih dan arti yang disepakati kadang berubah-ubah. (Finegan,2008:8). Menurut pernyataan Salzman bahwa “budaya manusia dengan segala kerumitannya tidak akan berkembang dan tidak akan dapat dipikirkan tanpa bantuan bahasa. “ Alasan keterkaitan bahasa dan budaya sederhana : keduanya bekerja sama dalam hubungan yang saling menguntungkan yang menjamin keberadaan dan kelangsungan keduanya. Untuk

memiliki suatu budaya, bahasa dibutuhkan, sehingga anggota suatu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai, dan perilaku dan aktivitas komunitas dapat terbangun. Bahasa mencerminkan apa yang penting dalam suatu budaya, sebaliknya budaya membentuk bahasa. Hal ini berarti bahwa aspek-aspek budaya yang penting bagi anggota suatu masyarakat digaris bawahi dalam kosakata. (Larry,Richard, dan Edwin, 2010,274)

Hakikat dan Orientasi Pola Pikir Etnis Kultur; Fasilitas fisik disediakan alam bagi manusia, maka manusia telah berada dalam determinan-determinan geonatur yang terpisah. Terpisahnya manusia oleh geonatur ini menyebabkan manusia terbagi ke dalam geokultur yang berbeda pula. Timbulnya etnis kultur karena dipisahkan geonatur tersebut, sehingga manusia membentuk lingkungan budaya (=geokultur) yang beragam. Setiap etnis kultur memiliki pola sikap, perilaku sebagai cerminan budayanya. Pada gilirannya pola-pola perilaku ini menjadi identitas etnis. Setiap etnis akan berorientasi kepada nilai-nilai etnisnya, sehingga akan menjadi problema di dalam mewujudkan etnis pada skala yang disebut bangsa. Semakin maju dan berkembang, kualitas kepentingan individu-individu maka semakin kompleks pula problema-problema etnis. Pada tangga ini etnis kultur mulai merasakan suatu kebutuhan jalinan dengan etnis kultur lainnya, yang pada gilirannya terjadi transaksi komunikasi antaretnis untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam suatu lingkup yang lebih

besar yang disebut Negara. Dalam lingkup ini timbul pola-pola baru dan nilai-nilai baru sebagai produk transaksi komunikasi yang menuntut setiap etnis untuk menerima dan menghargai serta menjunjung tinggi produk-produk tersebut. Dalam setiap masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya terdapat sejumlah nilai budaya yang antara satu dengan yang lainnya saling berkait hingga merupakan suatu sistem yang terus berproses dan mengarah ke fungsi primer sistem yaitu tujuan sistem.

Setiap sistem selalu diikat oleh norma-norma sistem sebagai pedoman sikap perilaku para penghuni sistem. Demikian pula nilai-nilai budaya suatu masyarakat merupakan pedoman yang memberi arah kepada sikap perilaku dalam hidup bermasyarakat. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan itu ada tiga wujud, yaitu: 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya; 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud yang pertama bersifat ideal dan abstrak yang berada dalam angan-angan atau cita-cita. Koentjaraningrat menyebut “kebudayaan ideal” sebagai *adat tata kelakuan* yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan member arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Dalam fungsi itu adat terdiri dari beberapa lapisan, dari yang paling abstrak dan luas, sampai

yang paling konkret dan terbatas. Lapisan yang abstrak adalah sistem nilai budaya. Lapisan berikutnya, ialah sistem norma adalah lebih konkret. Sistem hukum yang bersandar norma-norma adalah lebih konkret lagi. Sedangkan peraturan-peraturan khusus yang mengatur berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, merupakan lapisan adat yang paling konkret tetapi terbatas ruang lingkungannya. Wujud kedua, sering disebut sistem sosial, yaitu yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul antara satu dengan yang lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan pada adat tata kelakuan. Wujud ketiga, yaitu benda-benda hasil karya manusia yang disebut benda kebudayaan. Produk ini lebih konkret karena dapat dilihat, diraba dan dirasakan. Ketiga wujud kebudayaan yang telah diuraikan di atas dalam kenyataan empiris merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.

Dalam masyarakat yang diwujudkan oleh keragaman etnik kultur muncullah problema-problema etnik. Sifat-sifat dasar yang tampak dari keragaman etnik kultur dikemukakan oleh Pierre L. Van de Berghe dalam bukunya “*Pluralism and The Polity: A Theoretical Exploration*” sebagai berikut:

- 1) Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain;
- 2) Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-

lembaga yang bersifat non-komplementer;

- 3) Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
- 4) Secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang lain;
- 5) Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta
- 6) Adanya dominasi politik oleh satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya (Nasikun, 1988).

Sifat-sifat dasar etnik kultur sebagai produk pengelompokan geonatur dengan segala fasilitas yang disediakan. Dalam kondisi semacam ini filsafat komunikasi mengantar sikap etnis kultur yang berorientasi berskala kecil untuk berubah ke skala interaksi yang lebih luas. Kelompok-kelompok etnis harus mampu membuka tali isolasi etnis agar bersifat toleran terhadap sistem nilai etnis lain, sehingga terwujud sikap-sikap integratif yang tersusun dalam suatu struktur sosial yang lebih luas dengan sebutan Negara. Dalam kondisi ini etnis kultur sebagai kelompok kebudayaan (suku bangsa) yang berorientasi sikap perilaku dan pola kebudayaan kelompok bergeser ke sikap perilaku dan pola kebudayaan yang disebut "bangsa". Sebagai suatu bangsa dituntut memiliki pola pandang yang sama dengan bangsanya, dalam arti bahwa "geonatur" merupakan suatu kesatuan wilayah fisik sebagai bagian

dari alam semesta yang dihuni kelompok-kelompok etnis. Satu kesatuan wilayah fisik (di Indonesia muncul terminologi baku yang disebut "Wawasan Nusantara") mewadahi geokultur bangsa yang diikat oleh suatu pola kebudayaan sebagai suatu bangsa yang menjadi identitas pembeda terhadap bangsa-bangsa lain. (Sumarno, Kismiyati, Ninis Agustini, Filsafat dan Etika Komunikasi, 2000, 7.3-7.5)

Hakikat Komunikasi sebagai Hakikat Kebutuhan Etnis Kultur; Berkomunikasi merupakan hakikat kebutuhan manusia di dalam mempertahankan hidup, meningkatkan hidup dan memelihara keturunan yang sejahtera lahir dan batin. Hal ini merupakan nilai-nilai ideal yang berada pada setiap diri manusia baik sebagai individu perorangan maupun sebagai individu masyarakat. Untuk mencapai nilai-nilai ideal tersebut manusia yang berada dalam etnis kultur mulai mengoptimalkan fasilitas yang disediakan alam untuk memenuhi kebutuhan maksimal. Dalam kondisi semacam ini terjadi suatu proses pergeseran pola pikir yang oleh Van Pueren dikualifikasikan ke dalam tiga tahapan, yaitu pertama tahap *Mitis*, pada tahap ini cara berpikir manusia terikat nilai-nilai sakral yang ada pada alam dan melembaga pada diri manusia suatu sikap bahwa alam harus tetap utuh. Tahapan kedua yaitu tahapan *ontologis*. Pada tahapan ini keadaan masyarakat relative lebih maju dari masyarakat yang berada pada tahap *mitis*. Hal ini disebabkan pengaruh ilmu pengetahuan yang memasuki struktur masyarakat. Rujukan pribadi (*individual*

refence) dan rujukan masyarakat (*social reference*) mendorong untuk mengadakan perubahan walaupun pengaruh mitis dalam hal-hal tertentu masih ada. Interaksi dan transaksi komunikasi mulai bergeser ke skala yang lebih luas. Individu-individu mulai berkiprah untuk mencapai prestasi.

Pola pikir dan sikap perilaku berada di alam konkret, alam nyata berada dalam dunia empiris. Sikap terhadap alam tidak hanya ingin memanfaatkan, namun timbul hasrat untuk memiliki dan menguasai. Timbul transaksi untuk saling mengakui dan menghargai hak dan kewajiban. Setiap individu mempunyai hak untuk menikmati dan menguasai terhadap apa yang ia miliki, maka individu lain berkewajiban menghormati dan mengakui atas hak tersebut, sehingga tidak ada satu individu pun merasa dirugikan atau dilanggar hak-haknya. Hak-hak ini secara bertahap bergeser tidak hanya terhadap benda-benda konkret tapi juga terhadap benda-benda abstrak yang bersifat asasi. Tahapan berikutnya sebagai tahapan ketiga yaitu tahapan *funksionalis*. Pada tahapan ini manusia mulai berpikir rasional. Individu-individu manusia mulai berpikir tentang peran dirinya di tengah-tengah masyarakat. Simbol-simbol komunikasi mulai di-*encode* ke dalam suatu struktur kepentingan untuk meraih prestasi dan untuk mengembangkan prestasi dirinya (*locus internal*). Pada gilirannya terjadi kompetisi kepentingan, sehingga kecenderungan ke arah konflik kepentingan sangat memungkinkan apabila ego ideal

individu berusaha menempatkan pada ego individu lainnya.

Teori Manajemen Konflik;

Soerjono Soekanto menyebut konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/ atau kekerasan. Sementara Lewis A. Coser berpendapat bahwa konflik sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan. Gillin dan Gillin melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan (*oppositional process*). Artinya, konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi kebudayaan, dan perilaku. Gillin dan Gillin menyebut proses interaksi sosial sebagai proses disosiatif.

Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan baik ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, maupun pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan ini memuncak menjadi konflik ketika sistem sosial masyarakatnya tidak dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini mendorong masing-masing individu atau kelompok untuk saling menghancurkan. Konflik tidak sama dengan kompetisi, yang berarti perlombaan, dengan aturan main yang dipatuhi para pihak; jadi bukan

perbenturan. *Fair play* merupakan aturan main yang lazim berlaku. Jadi berbeda dengan konflik yang bisa menghalalkan segala cara atau bahkan dapat tanpa aturan main. Dari segi dinamikanya konflik bisa dibedakan menjadi konflik laten, mencuat (*emerging*) dan terbuka (manifest) pada konflik laten tekanan-tekanan belum tampak di permukaan dan belum sepenuhnya berkembang. Para pihak, termasuk pihak utama, bisa saja belum menyadari adanya konflik. Pada konflik yang mencuat pihak-pihak yang bertikai telah teridentifikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, umumnya permasalahan telah jelas, tapi proses negosiasi dan penyelesaian masalah belum berkembang. Dalam konflik terbuka para pihak aktif terlibat, mungkin sudah mulai berunding dan mungkin juga menemui jalan buntu (Konflik, Bahaya atau peluang-Mitra-mitra BSP Kemala, 2002).

Proses pertumbuhan konflik disebut eskalasi. Analogi api dalam sekam tepat kita pakai untuk menggambarkan sebuah konflik. Sebuah konflik laten bisa tak kunjung ke permukaan. Dapat padam dengan sendirinya karena tak ada angin yang meniup atau minyak (minyak tanah atau bensin) yang mengguyur sementara lapis tengah-atasnya lembab. Sebaliknya, ia bisa menjadi kobaran besar yang sulit dipadamkan dan menjilati apa saja di sekitarnya. Jadi, konflik bisa bertransformasi dari laten ke manifest; demikian sebaliknya. Sesuai eskalasinya, ia berderajat. Yang berderajat tertinggi adalah perang, yaitu konfrontasi terbuka dengan

mengarahkan strategi dan instrument apa saja termasuk penghancur dan pemusnah. Sesungguhnya, konflik merupakan sesuatu yang alami bagi manusia dan makhluk hidup lain. Apabila ada pergeseran dari titik keseimbangan (ekuilibrium) maka lumrah saja ia terjadi. Ini terjadi dalam hubungan antara individu, kelompok, masyarakat dan Negara. (Hasudungan Sirait, Jurnalisme Sadar Konflik, 2007,12-13).

Konflik atau pertentangan pada kondisi tertentu mampu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan, bahkan dapat menjelaskan kesalahpahaman. Mitchell, B. Setiawan, dan Rahmi, D.H., (2001). Dalam kehidupan yang dinamis antarindividu dan antarkomunitas, baik dalam organisasi di masyarakat yang majemuk, konflik selalu terjadi manakala saling berbenturan kepentingan. Konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial dimana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. (Cummings, PW 1980:41).

Proses Terjadinya Konflik;

Secara umum suatu konflik dapat terjadi apabila seseorang atau kelompok terhalang upayanya dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan paham terhadap tujuan itu sendiri, nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial, maupun terhadap tindakan dalam masyarakat. Terlebih lagi apabila sanksi atas

pelanggaran yang terjadi di atas nilai dan norma tidak dilaksanakan dengan adil, konflik dapat berubah menjadi tindakan kekerasan. Konflik sosial (pertentangan sosial) merupakan salah satu bentuk proses sosial yang disosiatif selain persaingan (*competition*) dan kontroversi (*contravention*) akibat adanya perbedaan-perbedaan tertentu dalam masyarakat maupun pribadi, seperti akibat perbedaan ras, suku bangsa, agama, bahasa, adat-istiadat, golongan politik, pandangan hidup, profesi, dan budaya lainnya.

Konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Hendricks, W (1992) mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari tiga tahap, yakni: 1) Peristiwa sehari-hari; 2) Adanya tantangan; dan 3) Timbulnya pertentangan. Peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Pada tahap kedua, apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Pertentangan merupakan proses terjadinya konflik tahap ketiga. Pada tahap ini masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain (Khomsahrial, 2011: 107-108).

Konflik melalui proses dan terdapat kondisi yang mendahuluinya. Harjana, A.M (1994:14) menyebutkan lingkaran konflik terdiri dari hal-hal sebagai berikut: Kondisi yang

mendahului, (2) Kemungkinan konflik yang dilihat, (3) Konflik yang dirasa, (4) Perilaku yang Nampak, (5) Konflik ditekan atau dikelola, (6) Dampak konflik. Sedangkan Terry G.R (1986) menjelaskan bahwa, konflik pada umumnya mengikuti pola yang teratur yang ditandai timbulnya suatu krisis, selanjutnya terjadi kesalahpahaman antar-individu atau kelompok, dan konfrontasi menjadi pusat perhatian, pada tahap berikutnya krisis dialihkan untuk diarahkan dan dikelola. Permulaan konflik merupakan kondisi-kondisi yang menyebabkan atau mendahului suatu peristiwa konflik. Peristiwa yang dapat mengawali munculnya konflik adalah adanya kekecewaan. Kekecewaan tidak selalu diungkapkan selalu terbuka dan gejala-gejala akan terjadinya konflik tidak dapat dilihat. Masing-masing individu ataupun kelompok berusaha menahan diri dan tidak bersifat reaktif.

Ektensi Konflik; Konflik merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan organisasi, bahkan konflik selalu hadir dalam setiap hubungan kerja sama antar-individu, kelompok maupun organisasi. Konflik selalu melibatkan orang, menyangkut masalah yang menjadi inti, mempunyai proses perkembangan, dan ada kondisi yang menjadi latar belakang, sebab-sebab dan memicunya (Harjana, A.M. 1994). Mengingat berbagai macam perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam bidang manajemen, maka wajar muncul perbedaan-perbedaan keyakinan ataupun ide-ide (Winardi, 1990:225). Demikian pula seiring

meningkatnya pengetahuan masyarakat, pandangan terhadap konflik berbeda dengan pandangan masa lampau. Sebagian besar pakar mengklasifikasikan pandangan tentang konflik terdiri dari pandangan lama (tradisional) dan pandangan baru (kontemporer). Pandangan tradisional menganggap konflik sebagai peristiwa yang negatif dan berusaha untuk meniadakan konflik, sedangkan pandangan baru menganggap konflik tidak dapat dihindarkan, karena kinerja organisasi yang optimal memerlukan konflik yang sedang (Gibson, J.I., 1996). Pandangan tradisional menganggap konflik tidak menguntungkan dan harus dihindarkan. Peristiwa konflik oleh pandangan lama dianggap sebagai adanya kesalahan dalam komunikasi, dan manusia pada dasarnya baik, benar, kooperatif, serta menyenangi kebaikan. Sedangkan pandangan kontemporer berpendapat bahwa, konflik itu baik dan harus didorong agar tetap muncul. Pandangan masa kini menganggap konflik merupakan kompetisi untuk mendapatkan penghargaan. Dan konflik sebagai peristiwa alami terjadi di dalam organisasi. Pada dasarnya manusia tidak selalu jelek, akan tetapi perlu diarahkan agar dapat berprestasi dan mau bersaing. (Khomsahrial, 2011, 112-114).

Jenis-jenis Konflik; Beberapa kejadian konflik telah diidentifikasi menurut jenis dan macamnya oleh sebagian penulis buku manajemen, perilaku organisasi, psikologi maupun sosiologi. Konflik antar kelompok, selama pertentangan (konflik) dilakukan

secara jujur, maka solidaritas kelompok tidak akan goyah. Persaingan yang jujur akan menyebabkan individu-individu semakin padu (kohesif) dalam mempertahankan prestasi kelompok. Konflik dapat mendorong kelompok bekerja lebih giat, masing-masing anggota termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan kelompok. Konflik rasial, sumber konflik bukan hanya perbedaan kepentingan, tujuan maupun kegagalan dalam komunikasi akan tetapi perbedaan kebudayaan dan ciri-ciri badaniah dapat menjadi latar belakang timbulnya konflik. Konflik rasial merupakan salah satu jenis konflik yang luas dibandingkan dengan konflik kelompok luas yang berjumlah mayoritas di suatu masyarakat cenderung ingin menguasai dan merasa mempunyai hak yang lebih luas. Sedangkan ras mayoritas berusaha menuntut persatuan hak dan ingin diperlakukan adil.

Konflik antarkelas sosial, masyarakat terdiri dari beberapa lapisan sosial yang hidup saling membutuhkan. Jenjang pendidikan dan tingkat kekayaan anggota masyarakat sangat bervariasi. Kelompok orang-orang kaya membantu kelompok miskin dalam bentuk santunan maupun memberikan kesempatan peluang pekerjaan. Demikian halnya kelompok masyarakat yang berpendidikan menjalankan tugas sebagai pendidik masyarakat melalui lembaga yang bersifat formal (sekolah) maupun bersifat non formal (kursus, perkumpulan/pengajian). Konflik terjadi mana kala sub-sub sistem di masyarakat tidak menjalankan fungsi secara adil

dan proporsional sehingga kelompok masyarakat tertentu merasa terabaikan.

Handoko, T.H. (1992) membedakan konflik menjadi 5 jenis, yaitu: (1) konflik dalam diri individu, (20 konflik antar-individu dalam organisasi, (30 konflik antara individu dengan kelompok, (4) konflik antar kelompok, dan (5) konflik antar organisasi. Konflik dalam diri individu, setiap individu mempunyai keinginan, cita-cita dapat dipenuhi sehingga menimbulkan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kepentingan individu seringkali berbeda dengan tujuan organisasi, karena itu agar kinerja organisasi tidak terganggu maka setiap anggota harus berusaha menyesuaikan. Konflik antar-individu dalam suatu organisasi, individu mempunyai perbedaan dalam hal kemampuan, kebutuhan, bakat, minat, kepribadian, maupun latar belakang lingkungan. Perbedaan dapat menjadi sumber konflik apabila masing-masing mempertahankan kepentingan anggota ataupun kepentingan yang lebih sempit. Akan tetapi pertentangan dan perbedaan pendapat dapat menjadi kekuatan organisasi jika diarahkan dan dikelola secara baik. Sedangkan A. Coser membedakan konflik atas dua bentuk, yakni konflik realistik dan konflik non-realistik.

1) Konflik yang realistik berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan maupun perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan

manajemen merupakan contoh dari konflik realistik.

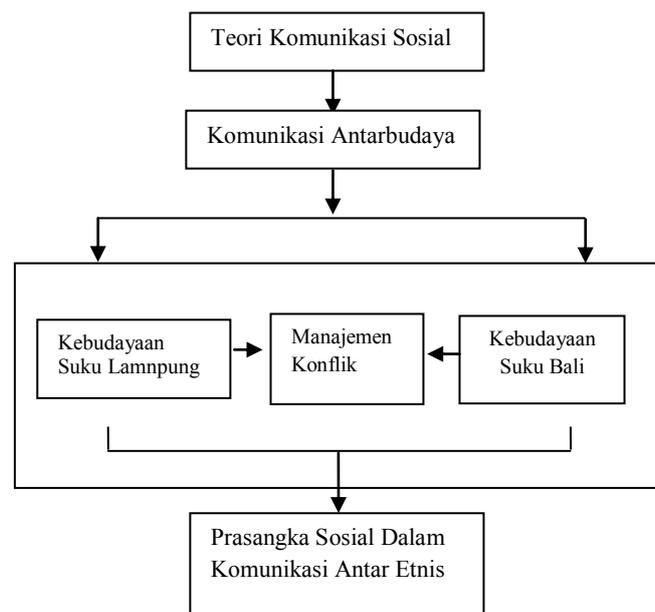
2) Konflik non-realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis (bertentangan, berlawanan), tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Dalam masyarakat tradisional, pembalasan dendam lewat ilmu gaib merupakan bentuk konflik non-realistik. Demikian halnya dengan upaya pengkambinghitaman yang sering terjadi dalam masyarakat yang lebih maju.

Berdasarkan kedua bentuk konflik diatas, Lewis A. Coser kemudian membedakan adanya konflik *in-group* dan konflik *out-group*. Konflik *in-group* adalah konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat sendiri. Contoh, konflik yang terjadi antar anggota dalam suatu geng. Sementara konflik *out-group* adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok atau masyarakat dengan kelompok atau masyarakat lain. Contoh, konflik yang terjadi antara satu geng dengan geng lainnya. (Ahmadi, 2009, 293-294).

Pandangan Teori Interaksi Sosial Terhadap Prasangka Sosial Dalam Komunikasi Antarbudaya; Kehidupan manusia dalam masyarakat mempunyai 2 macam fungsi yaitu berfungsi sebagai objek dan sebagai subjek. Demikian juga manusia lain, juga berfungsi sebagai subjek dan objek. Itulah sebabnya maka H. Bonner dalam bukunya *Social Psychology*

memberikan rumusan interaksi sosial sebagai berikut:“ Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.” (Ahmadi, 2009:49). Hal ini sebenarnya merupakan keuntungan yang besar bagi manusia, sebab dengan adanya dua macam fungsi yang dimiliki itu timbullah kemajuan-kemajuan dalam hidup bermasyarakat. Jika manusia ini hanya sebagai objek semata-mata maka hidupnya tidak mungkin lebih tinggi daripada kehidupan benda-benda mati. Sehingga kehidupan manusia tidak mungkin timbul kemajuan.

Berdasarkan uraian di atas secara ringkas dapat dikemukakan bahwa penelitian ini berpijak pada beberapa teori, yakni: **(1) Teori komunikasi sosial**, teori komunikasi sosial dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pengaruh komunikasi sosial dalam interaksi sosial antarbudaya; **(2) Teori antarbudaya**, teori komunikasi antarbudaya dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah bagaimana realitas kegiatan komunikasi yang dilakukan antara masyarakat suku Lampung terhadap suku Bali serta proses penanaman nilai-nilai berinteraksi kepada suku pendatang; **(3) Teori Manajemen Konflik**, teori manajemen konflik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah proses terjadinya konflik, jenis-jenis konflik dan cara mengatasinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan pada kajian teoretis, rumusan hipotesis kerja penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Jika masyarakat Suku Bali dan Suku Lampung mengurangi sikap prasangka yang negatif dalam kegiatan sehari-hari, saling menghargai satu sama lain, saling mendukung dan tidak cemburu sosial, maka tidak akan terjadi konflik antarbudaya di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.
- 2) Jika masyarakat Suku Bali dan Suku Lampung lebih cerdas dalam menerima sebuah informasi atau isu yang berkembang, tidak termakan provokasi dan bisa mengontrol emosi masing-masing, maka konflik antarbudaya tidak akan terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu (Bungin, 2007 : 75). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. (Rachmat, 2008 : 56). Dalam penelitian kualitatif periset adalah bagian integral dari data, artinya periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, periset menjadi instrument riset yang harus terjun langsung di lapangan. Penggunaan berbagai metode ini sering disebut triangulasi dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif (holistik) mengenai fenomena yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dari hal yang diteliti secara mendetail. Penelitian deskriptif bermaksud untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut peristiwa dalam penelitian, seperti pernyataan Gay dalam (Hikmat, 2011: 44) bahwa metode penelitian deskriptif adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang

sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi merupakan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dalam suasana yang berkenaan dengan situasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *participant observasi* dan *participant as observer*. Dalam hal ini peneliti dapat memberitahukan maksud kehadiran peneliti ataupun tidak memberitahukan kehadiran peneliti akan sangat bergantung kepada jenis data yang ingin peneliti peroleh (Hernawan, 2004:98-99). Peneliti menggunakan teknik observasi berdasarkan beberapa alasan, yakni : (1) Teknik pengamatan berdasarkan atas pengalaman secara langsung. Jika suatu data yang diperoleh kurang menyakinkan, maka jalan yang ditempuh untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut adalah tentang mengamati sendiri yang berarti mengamati langsung peristiwa tersebut, (2) memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya, (3) memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, (4) untuk mengecek kepercayaan data yang diperoleh jika peneliti lupa pada peristiwa atau hasil wawancara, (5) memungkinkan peneliti

untuk memahami situasi yang rumit, dan (6) pada kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan (observasi) dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. (Meleong 2011:174-175).

Teknik wawancara dalam penelitian ini yakni: 1) Wawancara terstruktur; Pada jenis wawancara ini, peneliti mengambil data mengenai kegiatan komunikasi antara masyarakat asli (suku Lampung) dengan Suku pendatang (suku Bali), serta pendapat dari masing-masing pihak yang terkait mengenai konflik yang terjadi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 2) Wawancara tidak berstruktur; Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pada teknik ini, peneliti mendapatkan data lebih dalam mengenai interaksi sosial antara suku asli dengan suku pendatang, cara komunikasi yang digunakan, serta sikap sosial penduduk asli terhadap warga suku pendatang di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data seperti jumlah penduduk asli dan pendatang, tanggal kehadiran Suku Bali di Desa Sidowaluyo, serta dokumentasi terkait kejadian konflik.

Informan dalam penelitian dikelompokkan dalam suatu karakteristik tertentu dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Pengelompokan tersebut

tidak dimaksudkan merujuk pada jumlah atau banyaknya informan, melainkan lebih merujuk pada karakteristik informasi yang disampaikan kepada peneliti sesuai dengan sesuai dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini dikelompokkan pada jenis kelamin, usia, strata sosial, suku.

Teknik Analisa Data Penelitian; Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif bersifat kualitatif, sehingga analisisnya digunakan pula teknik analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Hernawan (2004:100) dilakukan melalui proses:

- 1) Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
- 2) Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Menarik kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah analisis data tersebut bersifat interaktif.

Selanjutnya setelah data yang diperoleh dianalisis, maka hasil temuan yang diperoleh dapat diukur tingkat kepercayaan (validitas) dan keterandalannya (reliabilitas) dengan menggunakan kriteria : 1) Kredibilitas, 2) Transferabilitas, 3) Dependabilitas, dan 4) Konfirmabilitas, yang disebutkan Meolong (2011:288). Secara ringkas, analisis data dilakukan dengan

mereduksi semua catatan lapangan, menyajikan data dalam bentuk deskripsi sesuai dengan keadaan di lapangan, dan menarik kesimpulan. Dengan demikian analisis data bersifat menyeluruh. Pola analisis ini berlangsung terus-menerus selama penelitian di lapangan berlangsung.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dibagi dalam tiga tahap, yaitu: (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap *member check*. Tujuan orientasi dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Kegiatan ini dimulai dari panjajagan lapangan unntuk menentukan permasalahan atau fokus penelitian. Pada tahap eksplorasi dilakukan penjelajahan terhadap fokus penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui : (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. *Member check* dilakukan dengan tujuan untuk mengontrol data yang dikumpulkan agar keabsahan data tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Data yang dikumpulkan harus diakui kebenarannya oleh sumber informasi, kebenaran data harus dibenarkan oleh sumber data atau informan lainnya, Nasution dalam Hernawan (2004:97).

PEMBAHASAN

Sejarah Kehadiran Suku Bali di Desa Sidowaluyo Lampung Selatan; Provinsi Lampung yang berada di ujung timur pulau Sumatera ini memang memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan

provinsi lainnya di Sumatera. Di provinsi yang berpenduduk 7.608.405 jiwa (sensus 2010) ini ditempati oleh berbagai suku, selain suku asli Lampung sendiri di provinsi tersebut juga banyak penduduk / suku yang berasal dari Semendo (Sumsel), Bali, Lombok, Jawa, Minang/Padang, Batak, Sunda, Madura, Bugis, Banten, Palembang, Aceh, Makassar, warga keturunan, dan Warga asing (China, Arab). Salah satu keunikan lainnya dari Provinsi Lampung ialah banyak nama daerah / kecamatan yang dinamai seperti nama daerah di Pulau Jawa, seperti Bantul, Wates, Wonosari, Sidoarjo dan sebagainya. Hal tersebut bisa terjadi karena memang sejak zaman dahulu (Belanda) Provinsi Lampung adalah salah satu tempat tujuan transmigrasi dari tanah Jawa. Bahkan banyak masyarakat Lampung Suku Jawa yang belum pernah menginjakkan kakinya di Pulau Jawa.

Jumlah suku asli Lampung lebih sedikit dibandingkan suku-suku pendatang lainnya. Bahasa yang digunakan sehari – hari pun adalah bahasa Indonesia, berbeda dengan provinsi yang bertetangga dengan Lampung seperti Bengkulu dan Sumatera Selatan yang masih menggunakan bahasa daerah masing – masing sebagai alat komunikasi. Bahkan di beberapa kota / daerah di Lampung bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa komunikasi. Tentunya dengan berbaurnya berbagai macam suku tersebut maka tingkat kecenderungan untuk terjadinya konflik pun semakin tinggi. Sebenarnya konflik – konflik antar suku sudah sering terjadi

di Provinsi Lampung baik itu antara suku asli Lampung dengan Bali seperti yang terjadi di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo tahun 2012 yang lalu, maupun Jawa dengan Bali atau Lampung dengan Jawa. Tak heran ketiga suku tersebut sering terlibat konflik karena ketiga suku tersebutlah populasinya yang paling banyak. Pada sisi lain masyarakat asli Lampung yang memiliki falsafah hidup *fiil pesenggiri* dengan salah satu unsurnya adalah "*Nemui-nyimah*" yang berarti ramah dan terbuka kepada orang lain, maka tidak beralasan untuk berkeberatan menerima penduduk pendatang. Tetapi dengan seiring waktu falsafah hidup tersebut mulai luntur dikarenakan berbagai macam hal.

Di beberapa daerah di Lampung ada sebuah desa yang seluruh penduduknya berisi orang Bali. Di tempat tersebut juga biasanya terdapat sebuah pura besar tempat mereka melakukan kegiatan agama, sama persis seperti keadaan di Bali. Salah satunya di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan tepatnya berada di Dusun 01 dan Dusun 07 yang menjadi objek lokasi penelitian peneliti. Sejak 1950 masyarakat suku Bali hadir ke tengah-tengah masyarakat di Desa Sidowaluyo kecamatan Sidomulyo. Ada tiga marga suku Bali yaitu Bali Nusa, Jungut Batu, dan Tabanan (Bali Halus) yang tergabung dalam satu paguyuban umat Hindu yang disebut adat Banjar Sukaharja. Sekitar ± 100 Kepala Keluarga (KK) warga Bali hidup berdampingan dengan masyarakat dari suku lain di desa Sidowaluyo.

Penyebab Konflik Antarsuku di Desa Sidowaluyo; Konflik antar suku di Lampung bukan merupakan sebuah hal baru, konflik tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya dan pemicunya berawal dari masalah sepele. Seperti yang terjadi pada bulan Januari 2012, pemicunya adalah perebutan lahan parkir. Dari konflik kecil tersebut timbullah dendam diantara para suku-suku tersebut sehingga jika terjadi insiden kecil bisa langsung berubah menjadi sebuah konflik besar. Penelitian di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo ditemukan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu: Kecemburuan sosial berdasarkan bidang ekonomi, kenakalan remaja, prasangka sosial berdasar pada isu yang meluas di masyarakat.

Kesenjangan sosial bisa timbul dari berbagai hal. Salah satunya disebabkan oleh perbedaan status sosial maupun bidang ekonomi. Hal senada juga diungkapkan oleh informan 04, 09 salah satu penyebab terjadinya konflik adalah masalah ekonomi. Masyarakat Suku Bali membeli lahan masyarakat Lampung untuk bercocok tanam di daerah Suka Marga dan Suka Tani. Namun masyarakat asli kurang bisa menerima keadaan, karena masyarakat Suku Bali lebih maju dan lebih berkembang perekonomiannya. Mochtar Mas'ood menyatakan bahwa sebenarnya bentrok antar warga di Lampung Selatan pada 28-29 Oktober 2012 adalah bagian tak terpisahkan dari konflik yang terjadi sebelumnya yang kembali terulang. Konflik tersebut sesungguhnya memiliki akar persoalan

yang lebih dalam dari sekadar perseteruan dua kelompok etnis. Konflik-konflik sebelumnya terkait persoalan transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) hingga tambak udang, sebenarnya masih menyimpan persoalan yang belum tuntas sehingga konflik sewaktu-waktu dapat muncul kembali.

Disinilah pentingnya kita melihat kembali faktor sejarah dan sosiologis di balik konflik. Pada masa lalu, politik etis Belanda meliputi program irigasi, edukasi dan transmigrasi. Hal ini mendorong terjadinya proses state building dan akumulasi kapital sekaligus perubahan demografi. Perubahan itulah yang menjadi salah satu penyebab gesekan antara warga asli dengan pendatang. Terlebih lagi ketika pendatang mengungguli warga asli dalam hal ekonomi. Kecemburuan sosial dan ekonomi ini memunculkan sikap defensif sebagai “putra daerah”. (Sumber:

<http://ighoelmachete.wordpress.com/2012/12/16/peristiwa-konflik-balinuragalampung-selatan-dan-persatuan-indonesia/>)

Beberapa kerusuhan berdarah yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan dengan kerangka kesenjangan ekonomi atau perbedaan penguasaan atas akses sumber daya ekonomi. Kerusuhan antara etnis Dayak dan Madura di Sampit Kalimantan misalnya, bukan hanya disebabkan bangkitnya identitas kelompok tetapi juga disuburkan oleh tersisihnya etnis Dayak dari penguasaan politik-ekonomi selama puluhan tahun. Konflik Lampung Selatan juga dapat diteropong

dengan kerangka tersebut. Ketimpangan dalam penguasaan akses ekonomi antara etnis lokal dan pendatang sangat mungkin menyuburkan potensi konflik akibat perbedaan etnis di wilayah tersebut. Kelompok masyarakat etnis Bali di Lampung Selatan sebagai penguasa sektor ekonomi transportasi dan komunikasi, sebagaimana laporan beberapa media, adalah terbesar kedua di Kabupaten Lampung Selatan. Sementara kelompok asli Lampung “hanya” menjadi penonton dari kemajuan pesat perkembangan perekonomian kelompok masyarakat keturunan Bali, menjadi wong cilik yang bekerja di beragam sektor ekonomi. Kecemburuan sosial berbasis ekonomi inilah yang dapat diduga sebagai akar konflik yang ada tersebut. Akar konflik biasanya merupakan ketimpangan-ketimpangan, deprivasi, ataupun kesenjangan yang terjadi secara mendalam, terstruktur dan terinternalisasi di dalam tubuh masyarakat, tidak terlihat dan bahkan seringkali terabaikan. Adapun faktor pendorongnya adalah relasi antar masyarakat yang semakin renggang karena bergesernya tradisi hidup bersama menjadi individualistis, bergesernya tradisi generasi lama yang berupaya menciptakan harmonisasi hidup bersama menjadi tradisi generasi baru yang lebih mengedepankan cara pandang egosentris sehingga mudah terluka dan marah ketika kelompok atau anggota kelompoknya terganggu. Faktor pemicu dalam konteks konflik Lampung Selatan adalah beragam insiden-insiden kecil yang menyulut bara kecemburuan sosial-ekonomi. Selain itu, menurut

informan 07, 08, dan 10, pergolakan sosial di Lampung Selatan awalnya lebih karena persoalan tanah atau lahan perkebunan. Namun, kini pemicunya adalah insiden-insiden kecil yang cenderung merupakan hal-hal sepele. Insiden Napal dipicu perebutan lahan parkir. Namun karena masalah itu dibesar-besarkan dan yang membuat masalah mengajak warga lain akibatnya menjadi konflik besar antarsuku.

Menurut Coser jika diimplementasikan dalam permasalahan konflik antara Suku Bali dan Lampung:1) Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Terhadap persoalan konflik antara suku bangsa Bali dan Lampung adanya permasalahan penguasaan sumber daya yang tidak merata dari segi ekonomi dan lebih menguntungkan Suku Bali sebagai pendatang dengan segala bentuk arogansi menurut suku asli terhadap penguasaan sumber daya teritorial. Sehingga dalam bentuk kekecewaan terhadap perlakuan yang tidak adil menurut suku Lampung tersebut sehingga mereka membangkitkan identitas kesuku bangsaannya untuk mempertahankan penguasaannya dalam hal teritorial sumberdaya yang ada di wilayah teritorial kekuasaan suku asli. Terhadap perlakuan yang ingin memonopoli penguasaan sumber daya tersebut dilakukan dengan cara memusnahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan suku Bali, karena

batas – batas rasionalitas kemanusiaan sudah tidak lagi menjadi tolak ukur pada saat konflik. 2) Konflik Non-realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak ketiga yang mampu memfasilitasi segala kebutuhan yang membuat masyarakat berhenti berkonflik agar tidak jatuh korban jiwa berikutnya. Tetapi permasalahan ini tetap menjadi bahan referensi oleh suku Lampung walaupun pemerintah sebagai fasilitator untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan peran-peran dari para tokoh masing- masing suku agar menjaga masyarakatnya untuk mengatur kembali tatanan-tatanan sosial yang ada di dalam struktur dan fungsional dari masyarakatnya untuk meraih sumber daya yang ada dalam lingkup teritorialnya.

Konflik yang terjadi di Lampung Selatan ini melibatkan dua kelompok etnis yang berbeda yaitu kelompok masyarakat setempat yang beretnis Lampung dan kelompok masyarakat pendatang beretnis Bali. Sebenarnya, etnis Lampung sebagai “suku asli” ternyata bukanlah mayoritas dari segi jumlah. Kelompok etnis Jawa yang pendatang justru menjadi mayoritas. Etnis Bali termasuk minoritas di kalangan masyarakat Lampung Selatan sebagaimana yang ditulis dalam berbagai laporan media mengenai peristiwa tersebut.

Selain dua kelompok yang berkonflik, dapat diidentifikasi aktor-

aktor lain yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa konflik tersebut. Pertama adalah pemerintah daerah setempat. Dalam beberapa kasus yang mencuat, kebijakan bupati dan gubernur Lampung Selatan yang agak sensitif menjadi faktor pendorong dan pemicu konflik. Sangat disayangkan, dalam beberapa kasus, aparat pemerintahan seperti bupati dan gubernur, justru menjadi bagian dari konflik alih-alih menjadi mediator. Kedua adalah aparat kepolisian dan militer yang berada di daerah konflik tersebut bukan saja menjadi mediator tetapi juga untuk menurunkan eskalasi konflik. Ketiga, LSM-LSM yang telah ada dan baru datang kemudian dalam rangka penyembuhan trauma konflik di kalangan anak-anak dan remaja. Dapat dikatakan, dalam konflik Lampung Selatan, masyarakat setempatlah yang menjadi aktor perdamaian utama melalui serangkaian upaya rekonsiliasi.

Menurut informan 01, dan 07, konflik yang terjadi di Lampung Selatan semata-mata hanya kesalahpahaman dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Peristiwa yang menyebabkan 75 rumah warga Bali terbakar bahkan rusak parah dan menghabiskan dana hingga milyaran rupiah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat. Khususnya bagi warga suku Bali, mereka membuat kesepakatan dan sebuah komitmen bahwa apabila terjadi konflik lagi, siapa yang berbuat masalah maka dialah yang bertanggungjawab atas masalah tersebut. Melalui interaksi dan komunikasi antarbudaya yang baik,

sangat efektif untuk membentuk perilaku saling menghargai satu sama lain. Berasaskan kesadaran Bhineka Tunggal Ika dan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, diharapkan bisa menjadi landasan ideologi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegaradalam lingkungan yang berbeda latar belakang budaya dan adat istiadatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kegiatan komunikasi antarbudaya antara masyarakat Suku Lampung terhadap Suku Bali di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan belum berjalan dengan harmonis. Kesenjangan ekonomi menimbulkan permasalahan yang kompleks dan berlarut-larut antara kedua belah pihak.
2. Kenakalan remaja dan prasangka sosial menjadi penyebab terjadinya konflik antarsuku. Masyarakat harus cerdas dalam menerima sebuah informasi, apalagi masih berupa desas-desus dan isu dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
3. Konflik yang terjadi beberapa kali di Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan disebabkan oleh prasangka sosial dari satu kelompok terhadap kelompok tertentu. Masih rendahnya sikap toleransi dan tenggang rasa satu sama lain serta kurang adanya semangat persatuan dan kesatuan yang dilandasi oleh nilai dari semangat gotong royong guna mencapai sebuah masyarakat

yang adil dan sentosa dalam setiap aspek kehidupan yang menopang bangsa dan negara ini.

Saran

- 1) Untuk memaksimalkan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan, hendaknya kedua belah pihak menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mendukung untuk kemajuan desa dan daerah tempat tinggalnya.

Dapat meminimalisir terjadinya konflik kembali, masyarakat harus lebih teliti dan cerdas dalam menerima sebuah informasi yang sifatnya provokasi. Menanamkan nilai-nilai agama masing-masing agar tidak mudah emosi dan bertindak yang merugikan satu sama lain.

- 2) Saling menghargai dan tidak mengganggu kepentingan kelompok tertentu dalam hal apapun, seperti beribadah, pekerjaan dan sebagainya. Menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika dalam Pancasila, saling tolong menolong dan bersikap santun terhadap siapapun. Meningkatkan kerjasama kelompok demi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Menghilangkan etnosentrisme yang berlebihan terhadap sebuah sukubangsa atau etnis tertentu serta selalu berprasangka baik terhadap orang lain maupun kelompok.
- 3) Perlu dikembangkan lebih lanjut penelitian dalam bidang komunikasi antarbudaya untuk meminimalisir

terjadinya konflik antaretnis di Indonesia khususnya daerah-daerah yang rawan konflik seperti provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang sejenis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang sesuai dengan aspek-aspek teoritis dan metodologis tentang prasangka sosial dalam komunikasi antaretnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an. 2010. Bandung: Hilal
- Ahmadi, H. Abu. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: rineka Cipta.
- Bungin, Burhan., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1983. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1983. *Pemukiman Sebagai Kesatuan Ekosistem Daerah Bali*. Jakarta
- Devito, Joseph A. 1997. *Komunikasi Antarmanusia: kuliah dasar*. Jakarta: Profesional Books
- Hernawan, Wawan. 2004. *Komunikasi Antarumat Berbeda Agama: Studi tentang Sikap Sosial dalam Keragaman Beragama di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat*. Bandung: Universitas Padjajaran
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian : Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Satra*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Morissan, M.A. 2010. *Psikologi Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Mulyana, Deddy. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi : Contoh-contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2011. *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasikun. 1985. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli, Khomsahrial. 2011. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: PT Grasindo.
- Samovar, A, Larry, Dkk. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sihabudin, Ahmad. 2013. *Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidimensi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sunarto, Kamanto. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Susanto, S, Astrid,. 1979. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Binacipta.

Internet:

)<http://ighoelmachete.wordpress.com/2012/12/16/peristiwa-konflik-balinuraga-lampung-selatan-dan-persatuan-indonesialintasberita.web.id/perang-suku-di-lampung-sebuah-dendam-lama/>